

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo

Yisriyanto Ismail¹

Dikson Junus²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo

[¹yisrandismail@gmail.com](mailto:yisrandismail@gmail.com)

Abstract

This study aims to determine the determinant factors that influence the leadership of the Village Head in community empowerment in Bilato Village, Bilato District, Gorontalo Regency. This type of descriptive qualitative research is trying to analyze the variables of leadership and community empowerment. This study uses data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that 1) Village Head Leadership in community empowerment with democratic leadership style and freedom style or Laissez Faire. This can be seen from the various methods carried out by the Bilato Village Head, starting from the planning, implementation and supervision of the community empowerment process itself. While the factors that influence the leadership of the village head in community empowerment consists of two, namely: 1) supporting factors consisting of: a) the authority of a village head; b) power; and c) ability. 2) the next is the inhibiting factor, which consists of: a) lack of community participation in the empowerment program; and b) inadequate facilities and equipment.

Keywords : leadership, village head, community empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba untuk menganalisis variabel kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kepemimpinan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kebebasan atau Laissez Faire. Hal dapat dilihat dari berbagai cara yang dilakukan oleh Kepala desa Bilato yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas dua yaitu: 1) faktor pendukung yang terdiri dari: a) kewibawaan dari seorang kepala desa; b) kekuasaan; dan c) kemampuan. 2) selanjutnya adalah faktor penghambat, yang terdiri dari: a) partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang masih kurang; dan b) fasilitas dan peralatan yang masih belum memadai.

Kata Kunci: kepemimpinan, kepala desa, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan, itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program ditingkat desa akan membawa dampak pada kegagalan program pemerintahan di atasnya juga. Salah satu sasaran pokok pembangunan desa adalah

untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kiranya cukup disadari bahwa tidak jarang terjadi, hasil pembangunan desa hanya dinikmati oleh sekelompok elit desa atau bahkan orang-orang di luar lingkungan desa.

Pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa akan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Banyak teori yang menyatakan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa. Sebab pada pemerintahan yang paling bawah, kepala

desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan desa dan menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Penelitian terkait dengan kepemimpinan Kepala Desa telah banyak dilakukan sehubungan dengan urgensi isu tersebut dalam kajian ilmu pemerintahan khususnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Nurhayati A. Yasin dengan judul Gaya Kepemimpinan Kepala desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula. Menurut peneliti bahwa Gaya Kepemimpinan Kepala desa Tolinggula Pantai sangat baik atau dapat dikatakan pemimpin yang kharismatik dan pemimpin yang kooperatif terlihat dari cara atau perilaku Kepala desa dalam memberikan saran kepada staf Desa Tolinggula Pantai, menerima saran dan menyambut masyarakat yang kebetulan bertemu ditempat pelayanan sampai dengan cara mensosialisasikan program bantuan kepada masyarakat (Yasin, 2016).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Nur Rohmah dengan judul Gaya

Kepemimpinan Kepala Desa Wonosoco, Kecamatan Undan, Kabupaten Kudus dalam Rangka Pembangunan Desa yang Berkembang Tahun 2013-2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan Setiyo Budi selaku kepala desa adalah gaya demokratis dan gaya otoriter. Yang dimana kedua gaya tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Setiyo Budi juga menjalankan peran kepala desa dengan baik, seperti peran pemecah konflik, peran pengambil keputusan, peran pengawasan, peran penyampaian informasi, peran penumbuh semangat, peran mempengaruhi, dan peran hubungan komunikasi. Setiyo Budi merupakan pemimpin yang demokratis, terbukti dari beliau selalu mengikutsertakan bawahan setiap pengambilan keputusan (Rohmah, 2018).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat kita lihat bahwa penelitian terkait dengan gaya kepemimpinan Kepala desa sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menganalisis lebih jauh program pengembangan desa. Gaya kepemimpinan Kepala desa menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana Kepala desa berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan program pembangunan masyarakat. Secara lebih spesifik penelitian ini akan mengaitkan

aspek gaya kepemimpinan kepala desa dengan proses pemberdayaan masyarakat. Dimana gaya kepemimpinan kepala desa akan menentukan sejauh mana pelibatan masyarakat secara aktif dalam program-program pembangunan desa secara berkelanjutan.

Adapun penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Bilato, Kabupaten Gorontalo. Desa Bilato sendiri memiliki sumber daya dalam sektor perikanan dan petanian. Sementara itu jumlah keluarga miskin di Desa Bilato masih sangat banyak. Ini terbukti dengan data yang ada di BPS Kabupaten Gorontalo 2018, bahwa terdapat 101 KK miskin atau 29% dari 350 KK yang ada di Desa Bilato. Di Desa Bilato pun tercatat ada jiwa atau 30% penduduk yang tingkat pendidikannya hanya SD, dan 466 jiwa atau 36% yang belum bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong pada masyarakat yang bekerja jika ada panggilan kerja (kerja serabutan), jika tidak ada panggilan kerja, maka mereka menganggur.

Dengan berdasar pada data awal tersebut peneliti kemudian melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana Kepala desa berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya

menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam melihat Desa Bilato masih berpenduduk miskin, berpendidikan rendah dan belum terberdayakan secara optimal. Upaya-upaya inovatif Kepala desa dengan pelibatan masyarakat secara maksimal tentunya diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi yang lebih merata.

Kepala desa selaku pemimpin di wilayah tersebut diharapkan lebih efektif melaksanakan kepemimpinannya, serta mengajak kerja sama yang baik dengan pengurus, tokoh masyarakat, ketua BPD agar kendala yang ditemui di lapangan dapat dicarikan solusinya. Dalam hal ini kepemimpinan partisipatif dengan pelibatan penuh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan penting untuk dilakukan (Putra, 2019). Penelitian ini secara lebih spesifik mengaitkan antara gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala desa Bilato dengan upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sinergitas antara gaya kepemimpinan Kepala desa dengan program pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bilato pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kasus

yang dimaksudkan untuk menggali penjelasan secara mendalam dan melakukan analisa mengenai kepemimpinan Kepala Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara menggunakan kuesioner, observasi dan dokumenter. Dengan teknik wawancara, bisa diharapkan akan diperoleh informasi dan data mengenai kepemimpinan kepala desa dari sumbernya langsung.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pemerintahan, seksi kesejahteraan, kepala dusun, ketua BPD, LPM, karang taruna dan dua tokoh masyarakat. Hal yang akan diwawancarai sebagaimana yang dituangkan dalam point definisi operasional. Adapun observasi digunakan dalam pengambilan data mengamati secara langsung di lapangan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa terkait kepemimpinannya dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak diperoleh dalam wawancara. Yang terakhir dokumenter dimana peneliti dalam pengambilan data dengan mempelajari berbagai dokumen yang

terkait dengan kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.

KERANGKA TEORITIS

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa.

Pada pasal 1 (7) PP No.72 Tahun 2005 pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul, adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau disebut juga

dengan nama lain adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Dalam PP No. 72 Tahun 2015 Pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengatuan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa, seperti: pembuatan peraruran Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan kerja sama antar desa.

Fungsi Kepala desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6, tugas dan fungsi Kepala Desa yakni:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memepin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2) Kepala desa memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut;

4. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti: tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
5. Melaksanakan pembangunan seperti; pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
6. Pembinaan kemasyarakatan seperti; peaksanaan hak dan kewajiban massyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
7. Pemberdayaan masyarakat seperti; tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna.
8. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Konsep Kepemimpinan

Menurut Safaria (2004: 4-5) menyatakan bahwa: kepemimpinan

merupakan aktivitas orang-orang, yang terjadi di antara orang-orang, dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut (followers). Proses kepemimpinan juga melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Pada dasarnya konsep kepemimpinan adalah seni atau cara yang digunakan seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi yang di dalamnya terdapat proses komunikasi dan tujuan. Adapun konsep kepemimpinan dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran dan fungsi Kepala desa. Penelitian ini akan fokus melihat pada gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Bilato, Kabupaten Gorontalo.

Inu Kencana (2003: 27) menyatakan bahwa gaya atau dalam Bahasa Inggris "*style*" yang berarti corak atau model seseorang yang tidak banyak berubah dalam mengerjakan sesuatu, hal ini karena gaya merupakan kseanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam, metode yang khas dari seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu. Dengan demikian yang bersangkutan mendapat penghargaan untuk

keberhasilan dan kejatuhan nama bila mengalami kegagalan.

Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahannya, begitu juga antar bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan yang terendah sekali pun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesnsus atas kesepakatan bersama.

Gaya birokratis dalam kepemimpinan adalah cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, serta gaya yang ketat pada aturan, sehingga kemudia bawahan menjadi kaku tapi sederhana.

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan adalah cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-

luasnya. Selanjutnya yaitu gaya otokratis dalam kepemimpinan adalah cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peranan Kepala Desa sangat besar dalam pembangunan. Menurut pengamatan Hofsteede terhadap peran kepala desa di empat desa di Jawa Barat membuktikan hal itu. Para kepala desa yang diteliti menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam suatu proyek pembangunan. Mereka mendiskusikan dan seterusnya merapatkan dalam rapat desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek.

Menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Soemodiningrat (2002) Pendekatan utama dalam proses pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Ada beberapa faktor yang

menyebabkan peranan Kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kebanyakan kepala desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desa nya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat paternalistik. Kedua, Kepala desa mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo dapat dioperasionalkan dengan sebagai berikut:

- a) Membina kehidupan masyarakat desa
- b) Membina perekonomian desa
- c) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

HASIL PENELITIAN

Desa Bilato terletak di Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi

Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dari data yang ada bahwa untuk saat ini jumlah penduduk yang ada di Desa Bilato, Kecamatan Bilato berjumlah 350 Kepala

Keluarga atau dapat mencapai 1243 jiwa. Dengan rincian laki-laki 638 orang dan perempuan mencapai 605 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bilato

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Presentasi %
1	Laki-Laki	638	51%
2	Perempuan	605	49%
	JUMLAH	1243	100%

Sumber: Data statistik di Desa Bilato Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk Desa Bilato yang berjumlah 1243 jiwa yang menduduki porsi terbanyak adalah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yakni mencapai 638 jiwa atau 51 % sedangkan selebihnya yaitu 605 jiwa adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan yang mencapai 49 %. Masyarakat Desa Bilato Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan ada juga penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang/wirausaha dan pegawai negeri

sipil. Berdasarkan hasil penelitian dari data yang tersedia tercatat bahwa 38% adalah penduduk yang belum bekerja sementara urutan kedua 11% ditempati oleh penduduk yang bekerja sebagai petani, 7% penduduk yang bekerja sebagai nelayan, 0,3% adalah pegawai negeri, dan 2% adalah pedagang/wirausaha, dan swasta 3%. Di sektor pendidikan, penduduk Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo pada umumnya bervariasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk di Desa Bilato dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah jiwa	Presentasi%
1	TK	190	15%
2	SD	366	30%
3	SMP	126	10%
4	SMA	205	16%
5	Perguruan Tinggi	45	4%
6	Tidak Sekolah	221	18%
	JUMLAH	1243	100%

Sumber: Data statistik di Desa Bilato 2019

Berdasarkan Tabel 2. menunjukan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo didapatkan penduduk tidak sekolah mencapai 221 atau 18%, yang berada di bangku TK sebanyak 280 jiwa atau 22%, pada jenjang pendidikan SD mencapai 366 jiwa atau 30%, SMP sebesar 126 jiwa atau 10%, selanjutnya SMA sebanyak 205 jiwa atau 16%, Perguruan Tinggi sebesar 45 jiwa atau 4%. Dari data tersebut menunjukan minimnya pemuda di Desa Bilato untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi disebabkan karena kepala desa masih kurang memberi motivasi terhadap masyarakat untuk melanjutkan sekolah.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bilato meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Program pembangunan non fisik seperti pembangunan rabat beton, pembangunan jalan tani, pengadaan PLTS, pemasangan internet, pengadaan tanaman cengkeh/jabon, Penimbunan Lapangan Olahraga, dan Pembangunan saluran air. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pelatihan kepala desa dan perangkat Desa, peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat Desa, Kegiatan Posyandu, dan kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mata pencaharian masyarakat Desa Bilato mencapai 11%

sebagai petani dan tingkat pendidikan mayoritas hanya sampai tamatan SD. Dapat kita lihat bahwa Kepala desa masih kurang memberikan motivasi dan dorongan kepada para pemuda dan pelajar di desanya untuk selalu bersemangat dan tetap melanjutkan sekolahnya hingga sampai lulus di bangku kuliah.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari karang taruna yang menyatakan bahwa, Kepala Desa masih kurang memberikan motivasi dan dorongan baik kepada orang tua maupun pada muda mudi yang ada di desa untuk melanjutkan sekolahnya sampai lulus di bangku kuliah, bukan hanya itu saja jarak tempuh ke sekolah yang terhitung jauh dan transportasi yang ada di Desa Bilato juga masih kurang menjadi kendala kami. Biaya untuk transportasi pun masih cukup mahal, sehingga banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah (Wawancara, 8 Mei 2019).

Gaya Kebebasan (*Laissez Faire*) merupakan suatu gaya kepemimpinan yang memakai metode dengan memberikan keleluasaan terhadap bawahan dan masyarakatnya (Inu Kencana, 2003: 29), Handoko dan Reksohadiprodjo mengatakan bahwa ciri gaya kepemimpinan *Laissez faire* yaitu pemimpin membiarkan bawahannya atau masyarakatnya untuk mengatur dirinya

sendiri. Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kepala desa Bilato memiliki gaya kepemimpinan *Laissez Faire*, dan hal ini berdampak pada tingginya angka penduduk yang berpendidikan hanya sampai SD dan SMP saja, selain itu banyaknya masyarakat atau orangtua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan juga karena transportasi yang ada di desa masih terbatas menjadi masalah bagi masyarakat atau penduduk yang ada di Desa Bilato.

Menurut pengamatan peneliti kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, bisa dikatakan bahwa Kepala desa telah memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan Desa baik di bidang pembangunan Desa maupun ekonomi masyarakatnya serta usaha beliau dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang begitu perhatian. Sebagaimana hasil wawancara dari seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa Kepala desa memang merupakan sosok seorang pemimpin yang memiliki jiwa membangun yang tinggi, terbukti jika kita membandingkan dengan Desa yang lain, Desa kami ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik, seperti pembangunan, jalan tani, drainase dan pemberian bibit cengkeh yang sangat

bermanfaat untuk masyarakat dan desa (wawancara, 8 Mei 2019).

Kepemimpinan Kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa sebagai usaha dalam pemberdayaan masyarakatnya, beliau selalunya meninjau lokasi dan menyiapkan beberapa program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembangunan fisik. Agar program ini dapat terealisasi dengan baik dibutuhkan kerjasama yang baik dengan aparatur desa dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Teori kepemimpinan manusiawi dalam kepemimpinan adalah teori yang pemimpinnya benar-benar merasakan bawahan dan rakyatnya (Inu Kencana, 2003). Dari program yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Desa Bilato kepemimpinannya sama dengan Teori Kepemimpinan Manusiawi, dimana Kepala Desa memberikan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya

Pembangunan non-fisik berpengaruh juga dengan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu juga untuk diperhatikan meskipun kenyataannya masih banyak pemuda bahkan orang tua yang masih mengkonsumsi miras. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti,

memang masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi miras dan tidak ada larangan langsung dari kepala desa itu sendiri sedangkan dalam upaya pembangunan tetap masih melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang diadakan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa dibantu aparat desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat melakukan pembangunan yang berkelanjutan seperti pembangunan drainase yang telah dilakukan sejak tahun 2017 dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, pembuatan jalan usaha tani dan masih banyak lagi hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan, di mana dalam proses pembanguan dan pelaksanaan program pemberdayaan melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Bukan hanya pada pelaksanaan saja namun Kepala desa selalu melibatkan masyarakat pada proses perencanaan. Sebagaimana penuturan dari salah seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kami masyarakat diarahkan oleh Kepala desa untuk ikut serta mengambil andil dalam

kegiatan tersebut, dalam proses perencanaan kami masyarakat diberikan kesempatan oleh Kepala desa dalam menyampaikan program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan jika ada proyek dalam Desa maka yang dilibatkan sebagai pekerja diambil dari masyarakat setempat, salah satu contohnya pembuatan drainase pada tahun lalu semua pekerja adalah masyarakat di sini (wawancara, 8 Mei 2019).

Dari uraian informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala desa bilato lebih cenderung ke gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dan dalam pengambilan keputusan hasil kesepakatan Kepala desa dan aparatur desa sebagai wakil dari masyarakat.

Kepala Desa sebelum melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo selalu melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan hal apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan yang semakin membaik. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kepala desa selalu memantau bagaimana keadaan

masyarakat dan pembangunan yang ada serta kendala/permasalahan yang dirasakan masyarakat agar bisa dicarikan solusinya. Dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat, salah satu cara yang sangat membantu masyarakat adalah melalui program pembangunan. Dalam menjalankan program tentulah ada peninjauan dan perencanaan.

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam musyawarah tersebut agar sama-sama mengetahui program yang akan dilaksanakan di Desa dan tidak adanya rasa keberpihak dalam menentukan program serta lokasinya sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Pemerintah Desa menetapkan program pemberdayaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan kepemimpinan Kepala desa terhadap masyarakatnya, bisa dikatakan telah ada dorongan dan motivasi kepada masyarakatnya meskipun tidak banyak yang berpartisipasi dalam rapat yang bertujuan agar masyarakat giat bekerja, membangun Desa, dan ikut andil dalam pelaksanaan program Desa yang semuanya itu sangat

berkaitan erat dengan usaha untuk memberdayakan masyarakat.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepala desa menggunakan teknik motivasi alam kepemimpinan. Inu Kencana (2003) mengatakan bahwa teknik motivasi kepemimpinan adalah strategi pemimpin mendorong masyarakatnya bekerja serta membangun lebih rajin. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kepala desa beserta aparatnya berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan di mana tahun sebelumnya sudah mampu membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakatnya dan dengan terlaksananya program yang direncanakan ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi angka kemiskinan.

Kepemimpinan pelayan atau servant leadership adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan orang lain, aspirasi, dan kepentingan orang lain atas mereka sendiri (Senjaya dan Sarros 2002:57). Dan Teori kepemimpinan manusiawi dalam kepemimpinan adalah teori yang pemimpinnya benar-benar merasakan bawahan dan rakyatnya (Inu Kencana 2003: 18). Dari teori ini peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Desa Bilato sama persis

dengan teori kepemimpinan manusiawi. Terbukti Kepala desa selalu memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Kepala desa beserta aparat Desa terkhusus dari LPM bersama-sama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, Kepala desa memandang perlu untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakatnya melalui program pemberdayaan. Adapun bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat seperti penyediaan bibit-bibit/pakan ikan dan bedah rumah tidak layak huni. Tidak hanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dalam bidang pembangunan dan sosial Kepala desa juga membangun sarana dan prasaran seperti jembatan dan jalan usaha tani sedangkan di bidang sosial, Kepala desa membuat program untuk kaum perempuan yaitu PKK dan untuk para pemudanya dilibatkan dalam Karang Taruna Desa, kesemuanya ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakatnya agar lebih baik. Dan berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kepala desa langsung meninjau lokasi atau melihat keadaan rumah yang layak untuk diberikan bantuan dan aktif dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Dari uraian diatas

peneliti berkesimpulan bahwa Kepala desa Bilato gaya kepemimpinannya gaya kepemimpinan *laissez feire* atau gaya kebebasan. Dimana pemimpin membiarkan masyarakatnya untuk mengatur dirinya sendiri (Handoko dan Reksohadiprodjo, 1997).

Banyak program pembangunan yang dilaksanakan di Desa diharapkan mampu memperbaiki keadaan masyarakat agar lebih baik sebagai usaha Kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya, untuk program pembangunan itu sendiri merupakan tahap lanjutan dari program perencanaan pada tahun 2017 lalu. Dari hasil pengamatan peneliti, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sebelumnya memang telah berhasil dan program pemberdayaan tahun ini untuk dilaksanakan sedang menunggu dana Desa agar mampu diselenggarakan baik program yang baru maupun program sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya serta ada program tambahan, adapun program saat ini belum terlaksana dengan baik karena masih terkendala dengan dana. Namun untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pihak pemerintah Desa membuatkan

program lain seperti program sosial yaitu pemberian modal untuk UMKM dan badan usaha milik Desa.

Dengan melakukan perencanaan pemberdayaan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, diharapkan kepala desa bersama masyarakat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat baik sebagai pengelola dan pelaksanaan maupun dalam pengawasan kegiatan program tersebut, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pengawasan program yang sedang dilaksanakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan tim yang seharusnya mengontrol dan mengawasi jalannya program mulai dari pelaksanaan sampai pengawasan sementara kepala desa sebagai penanggung jawabnya, namun yang terjadi di lapangan TPK tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya di mana seharusnya sebagai tim pengawas digantikan langsung oleh kepala desa untuk mengawasi jalannya program. Hal ini dikarenakan kinerja dari TPK itu sendiri kurang bagus sebagai kontrol dan pengawas suatu program, apalagi yang dikhawatirkan Kepala desa jika ada kesalahan dalam pelaksanaan program karena sebagai penanggung jawab akan diminta pertanggung jawaban oleh pihak pemerintah kabupaten.

Sangat penting pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa pada tahap ini karena kepala desa harus mengarahkan/memandu program yang akan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada musyawarah bersama. Hal ini dapat diketahui bagaimana peran Kepala desa dalam mengawasi program yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa bila ada program yang sedang dikerjakan kepala desa meninjau langsung lokasi pekerjaan dan selalu dibantu oleh aparat desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kepala desa melakukan pengawasan hanya pada program sementara dilaksanakan dan tidak melakukan pengawasan setelah program itu dilaksanakan.

Pada tahapan pemberdayaan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang telah didapatkan. Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan

berkenaan dengan proses pelaksanaan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi mengenai program yang akan dan sedang dilaksanakan.

Dalam hal ini pengawasan adalah patokan atau ukuran untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Sehingga pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan program perencanaan dan bentuk pembangunan agar kerusakan atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan bisa diminimalisir. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah segi guna dan hasil guna pelaksanaan pekerjaan. Di lain pihak, Kepala desa sebagai pengawas juga dimaksudkan untuk membuat kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala desa pasti akan menghadapi rintangan dan harus berupaya mencari solusi/jalan keluar dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas faktor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, menunjukkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a) Kewibawaan dalam memimpin, Kepala Desa adalah sosok pemimpin yang tegas disiplin dan dekat dengan masyarakatnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan peduli terhadap masyarakat tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh dimata masyarakatnya sehingga dalam menjalankan perannya sebagai Kepala desa hal ini sangat berpengaruh. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian menyatakan bahwa Kepala desa Bilato adalah pemimpin yang tegas, disiplin dan peduli dengan masyarakat, sehingga ketika beliau memberikan arahan atau perintah kepada aparatnya, maka dengan senang hati kami bersegera untuk melaksanakan perintah beliau dan ketika ada masyarakat yang

meminta solusi dari permasalahan yang dihadapi, beliau dengan senang hati akan membantu masyarakatnya (wawancara, 9 Mei 2019).

- b) Kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dipegang oleh kepala desa, beliau mampu memberikan pengaruh dan menggerakkan serta bisa memberi instruksi langsung kepada aparat Desa agar melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan dan bisa dilaksanakan secepatnya di mana hal ini untuk mencapai tujuan bersama sebagai perwujudan peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Kepala desa lebih mudah memberikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas secepatnya dengan adanya kekuasaan yang dimiliki dan mudah bagi beliau memanggil bawahannya/aparat desa ke rumahnya untuk mengerjakan tugas yang ada, serta kekuasaan yang dimiliki kepala desa memudahkan beliau mengontrol kinerja para aparat desa (wawancara, 09 Mei 2019).
- c) Kemampuan, masyarakat di Desa Bilato sendiri masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma serta adat yang sifatnya turun temurun

yang ada dalam masyarakat yang bersifat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pula dari pemimpin yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis maupun sosial yang baik sehingga tidak diragukan lagi dalam memimpin. Menurut warga, kepala desa adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik, dihormati dan dari keluarga yang memiliki kemampuan dan keterampilan bersosialisasi yang baik. Dalam keluarga beliau juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sehingga masyarakat tidak takut akan tindakan KKN dari kepala desa itu sendiri dan tidak hanya nilai kejujuran yang diterapkan, tetapi nilai-nilai kebaikan yang lain seperti kedisiplinan dan kesopanan sangat ditekankan dalam keluarga beliau (wawancara, 09 Mei 2019).

Faktor penghambat yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, meliputi:

- a) Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi kepala desa. Karena masyarakat di Bilato sendiri sulit dikumpulkan

untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hanya mengutamakan pekerjaan masing-masing. Salah satu masalah yang dihadapi kepala desa adalah partisipasi masyarakat. ketika masyarakat diperintahkan untuk melakukan kerja bakti seperti di balai dan fasilitas umum lainnya, kurang masyarakat yang ikut berpartisipasi karena lebih sibuk dengan urusan pribadi mereka lebih mengutamakan pekerjaan pribadi dari pada kegiatan bersama (wawancara, 09 Mei 2019).

- b) Selain partisipasi masyarakat, fasilitas dan peralatan juga sebagai pendukung dalam hal pemberdayaan masyarakat. Semakin lengkap fasilitas dan peralatan yang ada akan membuat masyarakat tertarik dengan kegiatan pemberdayaan, sebaliknya jika fasilitas kurang memadai dan peralatan yang kurang tersedia akan menurunkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, fasilitas dan peralatan ini masih menjadi kendala yang dihadapi oleh Kepala desa Bilato. Diakui oleh aparat Desa Bilato bahwa aparat Desa dan Kepala desa masih menggunakan barang dan peralatan seadanya. Salah

satu contohnya adalah komputer, sebagai alat pendukung kerja dalam pembuatan administrasi di Desa masih sedikit jumlahnya. Serta tenaga teknis dalam bidang tertentu masih butuh pelatihan seperti pelatihan komputer, rancangan bangunan dan lain-lain (wawancara, 09 Mei 2019).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan penulis menyimpulkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Bilato dalam pemberdayaan masyarakat sama dengan teori kepemimpinan manusiawi dan lebih kepada gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan kebebasan. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan Kepala desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang Kepala desa dalam ketiga kategori tadi, namun di bagian perencanaan mendapat sedikit hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato ada 2 yaitu: Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kewibawaan, kekuasaan dan

kemampuan, Ketiga faktor pendorong ini memberikan kemudahan bagi Kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Faktor penghambat meliputi partisipasi penduduk, dan peralatan atau fasilitas. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bilato baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Di mana kurangnya penduduk ketika diajak untuk kerja bakti sehingga kepala desa sering mengalami kendala dalam menjalankan kepemimpinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azun, M. 2018. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Matabubu Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Skripsi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. 2018. Data Jumlah Keluarga Miskin Desa Bilato Kecamatan Bilato.
- Fathoni, M and Suryadi. 2015. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumanjang Kabupaten Lumanjang). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 139-146
- Gunawan, Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Handoko, T. Hani, 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.

- Yogyakarta. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)
- Kruse K. (2013). *What Is Authentic Leadership?*. Diunduh dari <http://www.forbes.com/sites/kevinkruseis-authentic-leadership/#197b2f012ddd>
- Putra, Hasrul Eka, and Atika Marzaman. 2019. *Application of Participatory Leadership in Optimizing the Potential of the Agricultural Sector in Gorontalo Regency*. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2.2 (2019): 50-58.
- Profil Desa Bilato Tahun 2015.
- Rustandi, Achmad. 1985. *Gaya Kepemimpinan*, Penerbit PT. Armico. Bandung.
- RPJM Desa Bilato Tahun 2015.
- Syafi'ie, Inu, K. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT. Refika Aditama
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Mamberdayakan Rakyat*. Bandung. PT. Refika Pratama
- Tannenbaum, R. Weschler, I. dan Massarik, F. 2013. *Leadership and Organization*. Los Angeles, Routledge.
- Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Undang-Undang PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015. *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta. Penerbit PT. Rineka Cipta.